

**KONTEKS PENGEMBANGAN EKONOMI – EKOLOGI MASYARAKAT
(COMMUNITY ECONOMY AND ECOLOGY DEVELOPMENT)
KABUPATEN PIDIE JAYA**

**OLEH
Drs. Nurjanah, M. Pd**

ABSTRACT

This research report has been reviewing the context of economic development - ecological communities Pidie Jaya. Seeing the condition of natural resource management, the problem lies in the management of natural resources related to the economic and ecological basis Aceh alleged birthplace of armed conflict in the 1970's. Political and economic tensions in the former conflict and tsunami destroyed the economy and ecology of the Acehnese people, usually heats up along with the emergence of rivalry between the various political and economic power. Momentum Momentum Aceh peace and elections have become the domain of the end of conflict and bring peace and the effects can be expected to accelerate the development process of Aceh in the future. The focus of the problem lies in the characteristics (Community Economic Development) around the area of operations of the company. In this survey, the Economy-Ecology parameter that will be seen are: Livelihood patterns, level of dependence on resources related to their livelihoods, access to economic capital and distribution, economic value of fishing for communities, Local Economic Infrastructure, Local Labour Force Figures , Gini Ratio and Rural Poverty Level (Village level). Primary and secondary sources of data will be analyzed with descriptive methods, qualitative and quantitative, Shape Activities: The process of recognition of the general characteristics of the Acehnese people and the communities that surround the region of Aceh Pidie, Pijay District, District Bireun and Sabang can be done in several ways including through observation / observation, intensive discussions (FGD, wawancara) and through the study of documents. Purposes, among others: Identifying structure-sekonomi social and ecological coastal communities, coastal communities identify vulnerabilities in the survey in the context of local community life and home economics, mapping key stakeholders and their roles in the socio-economic dynamics and ecology, and to prepare and establish recommendation program for local coastal communities in the context of social and environmental responsibility. Law of the sea in Pidie Jaya does not act as a medium of conflict resolution. The need for mentoring and training roles including chief merevitalisasi laot and customary law of the sea. The role of commander laot not only regulates maritime regulations for fishermen, but also as a medium of socialization and social conflict resolution. The role of maid agencies also quite a supervisor. In addition it is also important to community participation in politics so as to avoid themselves from desruktif political behavior, and the importance of cooperative relationships by regents Pidie quite legitimated.

Kata Kunci : Ekonomi,Pengembang,Ekologi.

PENDAHULUAN

Propinsi Aceh adalah salah satu propinsi di Indonesia yang saat ini menjadi perhatian banyak pihak di dunia. Perhatian ini muncul berkenaan dengan banyak hal, mulai

persoalan konflik bersenjata dan dampaknya, bencana alam, serta kondisi pengelolaan sumberdaya alamnya. Khusus mengenai hal yang terakhir, persoalan pengelolaan sumber daya alam berkaitan dengan ekonomi dan

ekologi Aceh menjadi isu hangat yang oleh sebagian pihak diduga sebagai dasar kelahiran konflik bersenjata di tahun 1970-an.

Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Aceh, terutama dalam peningkatan ekonomi dan ekologi Aceh. Masyarakat Aceh mesti dilihat sebagai suatu identitas sosial, politik, budaya, ekonomi dan hukum sudah lama terbentuk sejak awal abad ke XVI (1520 M). Yang ditandai terbentuknya Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayatsyah. Dua pilar yang mendasari dan mewarnai identitas masyarakat Aceh adalah Islam dan perdagangan. Menurut J.C.Van Leur, melihat masyarakat Aceh yang egaliter termasuk **Masyarakat Ideal Maritim** yang tentunya amat berbeda dari ideal tipe masyarakat Agraris. Apalagi Aceh terkenal sebagai wilayah yang memiliki resistensi terhadap segala upaya yang ingin mendominasi (apalagi "menjajah"). Kahin 1990, Aceh termasuk senditif terhadap orang-orang luar yang berkeinginan untuk menguasai Aceh. Orientasi ke-Aceh-an ini terkait dengan identitas Aceh, komitmen kepada Islam yang kuat, bahasa dan adat istiadat serta harga diri orang Aceh yang merupakan unsur-unsur yang melandasi identitas ke-Aceh-an.¹ Masyarakat Aceh berjuang demi identitasnya, menentang ketidakadilan, merasa dipinggirkan dan dizalimi.²

Kemajuan industri, setelah penemuan cadangan gas bumi besar di Aceh Utara pada tahun 1971, ditandai dengan migrasi pekerja dari luar Aceh dalam jumlah yang cukup besar ke wilayah ini dan dirasakan oleh banyak penduduk lokal sebagai mengganggu dan eksploitatif. Pada era 1970-an, hanya sejumlah kecil proporsi pendapatan dari Zona Industri Lhokseumawe kembali kepada pemerintah Aceh. Selain itu, tidak teraktualisasikannya identitas keacehan dalam wadah *nation state* yang dijalankan dengan sistem politik yang mendominasi, hegemonic, sentralistik, militeristik dan otoriter oleh pemerintah pusat.

Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi Gempa Bumi 8,9 Skala Richter disusul gelombang Tsunami melanda hampir seluruh daerah Aceh dan Nias Sumatra Utara serta 11 negara lainnya, yang telah menghancurkan sendi-sendi ekonomi dan ekologi Aceh, laporan Bappeda Aceh, 2009, *Sebelum Tsunami: Jumlah Penduduk: 4.297.485 Jiwa*, angkatan

Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abat ke-19, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Harley (editor), 2008, *Mukim Dari Masa ke Masa*, JKMA, Banda Aceh. Isa Sulaiman, 2006, *Mosaik Konflik di Aceh*, AcehKita dan ACSTF, Jakarta & *Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, Pustaka Al-kuasar, Jakarta. M Nuer El Ibrahimy, 1982, *Teungku Muhammad Daud Beureueh, Peranannya dalam Pergolakan di Aceh*, Gunung Agung, Jakarta. Otto Syamsuddin, 2001, *Dari Maaf Ke Panik Aceh (Sebuah Sketsa Sosiologi Politik)*, LSPP, Jakarta. Taufan Damanik, 2010, *Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalisme*, FES dan AFI, Jakarta.

¹ Anthony Reid, Ed., *Verendah of Violence The Background to the Aceh Problem*, (Singapore University Press, 2006), hlm. 12. Dan Hasil FGD dengan pihak KPA/PA dan KMPA Pidie tgl 6-7 Juni 2012.

² Beberapa buku untuk menggambarkan hal ini masih layak dibaca diantaranya ditulis oleh Anthoni Reid, 2005, *Asal Mula Konflik Aceh (Dari Perebutan Pantai Timur*

Kerja: 2.538.189 Jiwa, tingkat Pengangguran : 11,2% (dari Jumlah Penduduk), tingkat Pertumbuhan Ekonomi: 3,5% per Tahun, struktur perekonomian didominasi oleh sektor pertanian dan jumlah penduduk miskin 1,7 juta jiwa atau 40,39 Persen. *PascaTsunami*: Jumlah Penduduk 4.076.760 Jiwa, pertumbuhan ekonomi turun 0,25 % pada tahun 2005, tingkat pengangguran 11,2 %, pertumbuhan penduduk sebesar 1,5 % dan persentase penduduk miskin 28,8 %.³

Proses perdamaian yang ditandai dengan lahirnya MoU Helsinki tahun 2005 telah mentransformasi Aceh dari medan perang menjadi arena pertarungan politik dan ekonomi paling dinamis sekaligus laboratorium demokratisasi yang melahirkan terobosan-terobosan inovatif dalam politik Indonesia. Laga senjata berubah menjadi adu argument, hutan belantara, berubah menjadi hamparan meja perundingan. Komunikasi emosional menjadi rasional, lawan menjadi kawan, egois menjadi humanis. Dalam konteks ini, politik, negosiasi, komunikasi, diplomasi secara santun menjadi taruhan yang tidak mungkin dinafikan.⁴

MoU Helsinki 2005 dan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) juga membuka peluang besar bagi Aceh dalam segala hal, terutama ekonomi Aceh. Peluang tersebut mesti sesuai dengan semangat dan prinsip-prinsip dasar MoU dan UUPA.⁵ Prinsip-

prinsip dasar perekonomian⁶ Aceh diatur dalam MoU dan UUPA.

⁶ Prinsip-prinsip dasar dalam MoU Helsinki, Prinsip yang pertama dan mungkin yang paling fundamental dari MoU (Pasal 1.1.2a) menyatakan 'Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi.' Prinsip kedua MoU (Pasal 1.1.2b) menyatakan bahwa 'Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh,' prinsip ketiga (Pasal 1.1.2c) menyebutkan bahwa, 'Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh dan prinsip keempat MoU (Pasal 1.1.2d), menyatakan bahwa 'Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh. Prinsip-prinsip dasar Perekonomian di Aceh,

³ Sumber laporkan Bappeda Aceh, 2009.

⁴ Kamaruddin Hasan, Pilkada, Partai Lokal Dan Masa Depan Aceh, Harapan Berakhirnya Transisi (Dalam: Beranda Perdamaian Aceh tiga tahun pasca MoU, Pustaka Pelajar, 2008).

⁵ Hasil FGD dengan pihak KPA/PA dan KMPA wilayah Pidie, tanggal 5-6 Juni 2012.

mengacu pada UUPA Bab.XXII, antara lain disebutkan dalam **Pasal 154**, (1) Perekonomian di Aceh merupakan perekonomian yang terbuka dan tanpa hambatan dalam investasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional. (2) Perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan dan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta menjaga keseimbangan kemajuan kabupaten/kota yang ada di Aceh. (3) Usaha perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, penghormatan atas hak-hak rakyat setempat, pemberian peluang dan akses pendanaan seluas-luasnya kepada usaha ekonomi kelompok perempuan, serta pemberian jaminan hukum bagi pengusaha dan pekerja. Dalam **pasal 155**, (1) Perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan. (2) Perekonomian di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui proses penciptaan nilai tambah yang sebesar-besarnya. (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah

SBY-JK tetap konsisten memilih cara damai sebagai resep untuk mengakhiri konflik Aceh melalui kebijakan politik pengintegrasian yang tercermin pada butir-butir dalam MoU. Sejak Januari Juli 2005, pemerintah SBY-JK melakukan lima babak komunikasi politik formal maupun informal dengan Gerakan Aceh Merdeka untuk melakukan perundingan sebagai cara damai menyelesaikan konflik Aceh. Pembicaraan informal ini difasilitasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI) sebuah lembaga yang dipimpin bekas Presiden Finlandia Martti Ahtisaari dengan mengambil tempat di Koenigstedt Estate yang terletak diluar Ibukota Finlandia Helsinki.⁷ Pemerintahan SBY-JK melakukan terobosan melalui pendekatan baru⁸ dalam penyelesaian

kabupaten/kota melakukan penyederhanaan peraturan untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lain sesuai dengan kewenangan.

⁷ Moch.Nuhasim, *Perundingan Helsinki; Jalan Menuju Dalam Aceh*. (Dalam: Beranda Perdamaian Aceh tiga tahun pasca MoU, Pustaka Pelajar, 2008), h. 108

⁸ Dianggap sebagai pendekatan baru, karena SBY-JK konsisten untuk menempuh jalur dialog yang tidak disertai oleh pengerahan pasukan keamanan. Di bawah supervisi Jusuf Kalla yang secara konsisten dan terus menerus untuk memilih cara damai dalam menyelesaikan konflik Aceh. Meskipun cara ini tidak sepenuhnya dapat disebut baru, karena di masa Orde lama telah dilakukan oleh Soekarno dalam menyelesaikan pemberontakan DI/TII di Aceh dan

pemberontakan GAM, yang mementahkan pendekatan-pendekatan sebelumnya, walaupun banyak pihak yang tidak setuju. Akhir dari komunikasi politik informal dilanjutkan dengan pertemuan formal yang melahirkan penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Mengingat tensi politik dan ekonomi di wilayah bekas konflik dan tsunami yang menghancurkan ekonomi dan ekologi masyarakat Aceh., biasanya memanas seiring dengan munculnya rivalitas antara berbagai kekuatan politik dan ekonomi yang bertarung. Untuk itu perlu dipahami, momentum-momentum yang dapat membawa masa depan Aceh kearah yang lebih baik, antaranya:⁹

Momentum damai Aceh, bahwa setelah perjanjian damai ini tidak ada lagi perang, bumi Serambi Mekkah menjadi aman, rakyat bebas melakukan berbagai aktifitas tanpa ada ancaman dan teror. *Momentum* selanjutnya Pilkada, bahwa cahaya perdamaian itu makin bersinar ketika pilkada yang berlangsung 11 Desember 2006 paling demokratis telah mampu memberi ruang baru

pemberontakan-pemberontakan di daerah lain seperti PRRI/Permesta di Sumatera Barat. Dalam konteks penyelesaian DI/TII di Aceh, lihat M.Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, edisi revisi, (Jakarta: Media Da,wah, 2001). Sementara untuk penyelesaian PRRI/Permesta dapat dilihat dalam tulisan, Barbara Harvey Sillar, *Permesta: Pemberontakan Setengah Hati*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), h. 78-83.

⁹ Kamaruddin Hasan dan Nuhasim, Dalam: Beranda Perdamaian Aceh tiga tahun pasca MoU, Pustaka Pelajar, 2008).

bagi sirkulasi kekuasaan di Aceh. *Momentum* yang tak kalau penting adalah adalah Pilpres 9 Juli 2009 yang lalu, terpilihnya kembali Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dan Boediono sebagai Wakil Presiden dan telah berhasil menyusun Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, dan pilihan rakyat hampir 90% jadi kepada pasangan ini. Angka yang mengejutkan bahwa pasangan Presiden dan Wakil Presiden ini menang mutlat di Aceh. *Momentum* Pemilu pada 2012, yang sempat diwarnai berbagai konflik. Namun hal ini dapat diselesaikan dengan baik, sehingga Pemilu pada 2012 dapat berjalan dengan baik. Dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih (dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf). Pesaing Utama adalah Drh. Irwandi Yusuf dan Muhyun Yunan. Angka yang mengejutkan bahwa pasangan Zaini dan Muallim ini menang diatas 50%. Sehingga hal ini menjadi momentum tersendiri dalam proses percepatan pembangunan Aceh ke depan. Pasangan ini diharapkan dapat membawa Aceh lebih maju dan bermartabat. Pemimpin yang mampu menjadi mediator, pemimpin yang baik dan berkualitas. Rakyat Aceh, membutuhkan rasa aman, damai, pembangunan berjalan, ekonomi meningkat, dan hak-hak sosial, budaya dan politik, ruang public menjadi penting diperjuangkan.

1. 2. Rumusan Masalah dan Fokus Penelitian

Sehubungan dengan hal tersebut diatas , geliat perubahan kondisi Ekonomi, politik dan keamanan, geliat sektor ekonomi juga mulai menjadi menarik dikaji. Keberadaan beberapa industri besar di Aceh tanpa ditangani dengan baik akan menimbulkan dan mengalami permasalahan dalam proses produksi juga menjadi perhatian juga ramai dibicarakan. Sulitnya mendapatkan gas bumi sebagai bahan baku mempertahankan operasional beberapa perusahaan yang sudah ada oleh sebagian kalangan dianggap sesuatu

yang tidak masuk akal. Ini disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa di Aceh juga terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di bidang eksploitasi minyak bumi dan gas alam dalam skala yang besar. Namun apa lacur, keberadaan perusahaan pertambangan minyak bumi dan gas alam ternyata tidak serta merta berdampak bagi kesejahteraan ekonomi rakyat Aceh.

Salah satu kawasan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Blok. Andaman III yang sudah mulai dilirik oleh investor. Pertambangan ladang minyak bumi dan gas alam tersebut juga menuntut perlunya sebuah pendekatan baru dalam pengelolaannya, utamanya yang berkenaan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk yang ada di sekitar ladang minyak dan gas tersebut. Ini menjadi sangat penting sebab eksepsi dan apresiasi penduduk atas pengelolaan kawasan tersebut akan berhubungan erat dengan upaya mendukung tetap beroperasinya beberapa industri besar di Aceh.

Berkenaan dengan kenyataan tersebut, pengenalan terhadap karakteristik (*Community Economi Development*) di sekitar kawasan beroperasinya perusahaan tersebut akan sangat berguna oleh pengelola baru untuk menjamin kelancaran produknya di kemudian hari.

Dalam survey ini, Parameter Bidang Ekonomi-Ekologi yang akan dilihat adalah; Pola Matapencaharian (perikanan, daerah penangkapan ikan, teknologi, dll), Tingkat Ketergantungan pada sumberdaya yang berkaitan dengan mata pencaharian mereka (kegiatan berbasis perikanan), Akses terhadap modal ekonomi dan distribusi (termasuk pemasaran perikanan lokal dan perdagangan), Nilai ekonomi kegiatan perikanan bagi masyarakat, Infrastruktur Ekonomi Lokal, Angka Angkatan Kerja Lokal, Gini Ratio dan Tingkat Kemiskinan Desa (Village level)

1.3. Metodologi Penelitian.

Sumber data Primer dan Sekunder akan di analisis dengan Metode Deskriptif, Kualitatif dan kuantitatif, Bentuk Kegiatan: Proses pengenalan terhadap karakteristik masyarakat Aceh secara umum serta masyarakat yang ada di sekitar kawasan Aceh Pidie, Kabupaten Pijay, Kabupaten Bireun dan Kota Sabang dapat dilakukan dengan beberapa cara di antaranya melalui pengamatan/observasi, diskusi intensif (FGD, wawancara) dan melalui studi dokumen. Dengan tujuan, antara lain: Mengidentifikasi struktur social-sekonomi dan ekologi masyarakat pesisir, mengidentifikasi kerentanan masyarakat pesisir di wilayah survey dalam konteks kehidupan masyarakat setempat dan ekonomi rumah tangga, memetakan stakeholder kunci dan peran mereka dalam dinamika sosial-ekonomi dan ekologi dan menyusun dan menetapkan rekomendasi untuk program masyarakat pesisir lokal dalam konteks tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Hasil atau Output Studi yang diharapkan: Struktur ekonomi – ekologi dan pemetaannya, Pemetaan pelaku dalam konteks pengembangan struktur masyarakat, Pola interaksi social, ekonomi dan potensi konflik di masyarakat, Peran kelompok masyarakat dan gender dalam kelompok-kelompok sosial, Diskripsi peran dan partisipasi masyarakat miskin dan kelompok perempuan, Peta Permasalahan: Lingkungan, Infrastruktur, Kelembagaan, Bisnis, Mata Pencaharian, Air dan Sanitasi, Pasar, ekonomi, dan ekologi dan pedoman dan referensi untuk melaksanakan program pengembangan masyarakat khususnya Program CSR kedepan. Waktu dan Metode Pengumpulan Data, sebagaimana telah disebutkan di awal, bahwa proses kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data awal yang

diharapkan akan bisa memberi tambahan pengetahuan mengenai kondisi sosial, ekonomi dan ekologi masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya. Proses pengumpulan data dilakukan 4-15 Juni 2012.

Sementara itu, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut: *Observasi*, proses pengamatan yang dilakukan terhadap kehidupan masyarakat di Aceh Pidie, Pidie Jaya, Bireun dan Sabang. Pada awalnya hanya difokuskan pada beberapa kecamatan dan desa Pesisir yang dianggap memiliki kedekatan dengan Andaman III. Namun demikian, pada perkembangan selanjutnya pengamatan dilakukan berkembang pada desa-desa atau bahkan kecamatan yang pada mulanya dianggap tidak berkaitan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak/gas yang akan dilakukan. Kalau pada mulanya pengamatan hanya dilakukan di kecamatan dan Desa Pesisir, pada kenyataannya dilapangan juga di observasi kecamatan dan desa yang bukan katagori pesisir atau pedalaman dan Kota.

Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya ini untuk diamati sebagian besar lebih didasarkan pada peta yang kami peroleh dari Tim Sosial Mapping yang kemudian kami bandingkan dengan kondisi terkini di lapangan. Hal yang diamati, selain berkaitan dengan aktivitas sosial ekonomi dan ekologi, juga meliputi kondisi dan pola pemukiman dan hal-hal lainnya yang dianggap relevan untuk membantu menjelaskan kondisi sosial ekonomi dan ekologi masyarakat.

Wawancara, proses yang dilakukan secara Individu dan tim secara umum bersifat wawancara bebas dan intensif. Wawancara bebas diartikan sebagai sebuah kegiatan wawancara untuk menggali data tanpa harus dirancang terlebih dahulu kondisi dan pada siapa wawancara dilakukan. Namun demikian penajaman materi wawancara juga dilakukan

tim, dengan melakukan wawancara intensif terutama dengan person yang memiliki informasi mendalam tentang objek penelitian ini. Untuk wawancara intensif dilakukan oleh tim utama, sedangkan wawancara tim juga dibantu dengan enumerator (tim penggali data tambahan). Selama di lapangan, masyarakat yang berhasil diwawancarai memiliki latar belakang sosial ekonomi yang beragam sehingga sedikit banyak bisa menggambarkan diferensiasi persepsi dan tanggapan tentang kondisi rill ekonomi dan ekologi.

Focus Group Discussion (FGD), rangkaian FGD dilakukan dengan harapan selain tergal data yang beragam dari banyak orang juga akan secara otomatis terjadi *cross check* data. Sampai dengan proses penggalian data selesai dilakukan telah berhasil dilakukan FGD. FGD dilakukan dengan Unsur PEMDA, Kelompok kepentingan, Panglima Laot, KPA-KMPA, Tokoh Masyarakat, Geuchik, Umum Mukim, dan lain-lain. Serta studi dokumen, studi ini dilakukan hanya sebatas pada dokumen yang memuat data sekunder seperti laporan berkala Badan Pusat Statistik, sebagian artikel koran serta beberapa buku yang memuat tentang sosial ekonomi dan ekologi di Kabupaten Pidie Jaya.

PERKEMBANGAN EKONOMI – EKOLOGI MASYARAKAT DI KABUPATEN PIDIE JAYA

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Pidie Jaya

2.1.1. Sejarah Pidie Jaya.

Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten baru di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Ibukotanya Meureudu. Kabupaten ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4683), pada tanggal 2 Januari 2007.

Negeri Meureudu pernah dicalonkan sebagai Ibu Kota Kerajaan Aceh. Namun konspirasi politik kerajaan menggagalkannya. Sampai Kerajaan Aceh runtuh, Meureudu masih sebuah negeri bebas. Negeri Meureudu sudah terbentuk dan diakui sejak zaman Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa (1607-1636) Meureudu semakin diistimewakan. Menjadi daerah bebas dari aturan kerajaan. Hanya satu kewajiban Meureudu saat itu, menyediakan persediaan logistik (beras) dan militer untuk kebutuhan Kerajaan Aceh.

Dalam perjalanan tugas Iskandar Muda ke daerah Semenanjung Melayu (Malaysia -red) tahun 1613, singgah di Negeri Meureudu, menjumpai Tgk Muhammad Jalaluddin, yang terkenal dengan sebutan Tgk Ja Madainah. Dalam percaturan politik Kerajaan Aceh Negeri Meureudu juga memegang peranan penting. Hal itu sebagaimana tersebut dalam Qanun Al-Asyi atau Adat Meukuta Alam, yang merupakan Undang-Undang (UU) nya Kerajaan Aceh. Saat Aceh dikuasai Belanda, dan Mesjid Indra Puri direbut, dokumen undang-undang kerajaan itu jatuh ke tangan Belanda. Oleh K F Van Hagen, dokumen itu kemudian diterbitkan dalam salah satu majalah yang terbit di Negeri Belanda.

Dalam Pasal 12 Qanun Al-Asyi disebutkan, "Apabila Uleebalang dalam negeri tidak menuruti hukum, maka Sultan memanggil Teungku Chik Muda Pahlawan Negeri Meureudu, menyuruh pukul Uleebalang negeri itu atau diserang dan Uleebalang diberhentikan atau diusir, segala pohon tanamannya dan harta serta rumahnya dirampas." Kutipan Undang-Undang Kerajaan Aceh itu, mensahihkan tentang keberadaan Negeri Meureudu sebagai daerah kepercayaan sultan untuk melaksanakan segala perintah dan titahnya dalam segala aspek kehidupan

politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan Kerjaan Aceh Darussalam.

2.1.2. Geografis

Kabupaten Pidie Jaya adalah Kabupaten pemekaran yang sebelumnya masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Pidie. Luas wilayah Kab. Pidie Jaya adalah 1.162,84 KM² (952 KM² darat dan 210,84 KM² lautan). Pemerintahan Kabupaten Pidie membawahi 8 Kecamatan, 34 Kemukiman, 222 Gampong, dan 600 dusun.¹⁰

1.1.3. Demografi / Kependudukan

Jumlah Penduduk tahun 2010 adalah 132.956 jiwa (Laki-laki 65.004 jiwa, Perempuan 67.952 jiwa, Sex ratio 95,66%). Jumlah Penduduk tahun sebelumnya adalah 146.964 jiwa¹¹. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2009 sebesar 03,41% (dari 141.949 jiwa pada 2008), dan tahun 2010, menurun sebesar 10,54%.

Tabel 1

Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Sektor Usaha di Kabupaten Pidie Jaya, 2010¹²

Sektor Usaha	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja			
		WNI		WNA	
		L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pertanian	1	72	3	-	-

¹⁰ Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya

¹¹ Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya

¹² Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Jaya

				5		
2	Pertambangan	2	15	9	-	-
3	Industri Pengolahan	33	189	1	-	-
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	2	15	9	-	-
5	Bangunan	-	-	-	-	-
6	Perdagangan, Restoran dan Hotel	13	45	12	-	-
7	Pengangkutan dan Komunikasi	-	-	-	-	-
8	Lembaga Keuangan dan Sewa Bangunan	-	-	-	-	-
9	Jasa Kemasyarakatan	15	80	33	-	-
Jumlah		66	416	99	-	-

2.2.1. Fasilitas Publik

2.2.1.1. Jalan dan Jembatan¹³

Total ruas jalan di Kab. Pidie Jaya pada akhir 2010 adalah sepanjang 416,6 KM, dengan rincian: 1) Jalan Negara sepanjang 37,9 KM, Jalan Provinsi memiliki total panjang 9,8 KM, jalan Kabupaten sepanjang 368,90 KM. Panjang total Jembatan di Kab. Pidie Jaya pada akhir 2010 adalah 62M (43M berkonstruksi beton, 19M jembatan gantung permanen).

¹³ Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya

2.2.2. Potensi Perikanan, Kuala, TPI dan PPI¹⁴

- a. Luas Areal Usaha Perikanan Budidaya di Kabupaten Pidie Jaya, Tahun 2010 : 20.947M³ Kolam, 2.086,22Ha Tambak, 64,35 Ha Waduk
- b. Produksi dan Nilai Produksi perikanan laut:

Jenis komoditi		Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Ribu Rp)
A. Ikan Laut			
1	Sebelah	305	3.660.000
2	Lidah	19,5	253.500
3	Kakap Merah	19	627.000
4	Kurisi	120	2.040.000
5	Kuwe	177	3.894.000
6	Layang Deles	1.675	23.450.000
7	Lemadang	85	680.000
8	Teri	1.665	24.975.000
9	Kembung	460	6.900.000
10	Tenggiri	118	3.304.000
11	Layur	170	2.720.000
12	Kakap Putih	59	1.888.000
13	Cakalang	620	10.540.000
14	Tongkol Abu-abu	880	10.560.000
15	Kerapu Bebek	10	320.000
16	Kakap Batu	50	400.000
17	Madidihang (Tuna)	1.975	43.450.000
18	Ikan Lainnya	127	1.651.000
B. Udang			
1	Udang Putih	60	2.400.000
2	Udang	45	2.250.000

¹⁴ Sumber: Hasil observasi 2012 dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya

Windu		
-------	--	--

--	--

c. Produksi perikanan budidaya:

	Jenis Komoditi	Produksi (Ton)
1	Udang Windu	270,30
2	Bandeng	437,48
3	Belanak	63,84
4	Patin	3,09
5	Gurame	1910,03
6	Lele	27,53

Daftar : Rekapitulasi Jumlah Armada Kapal Menurut GT Tahun 2011

No	Kecamatan	Ukuran Kapal			Motor Tempel	Sampin Mesin	Perahu Tanpa Motor
		2-5 GT	7-15 GT	20-50 GT			
1	Jangka Buya	17	7	-	-	66	3
2	Ulim	25	8	-	-	30	2
3	Meurah Dua	19	-	6	13	40	19
4	Meureudu	20	1	7	149	-	-
5	Trienggaden	57	1	-	-	61	3
6	Pante Raja	74	45	-	-	40	1
7	Bandar Baru	22	-	-	1	27	-
JUMLAH		234	62	13	163	264	28
JUMLAH TOTAL		764					

Daftar : Jumlah Alat

Tangkap

75 unit, Gill Net 110, Jel Net 80, Pancing Rawai, alat Tangkap lainnya 255
Jumlah 764

Daftar : Jumlah Produksi

- 1 Tuna, 1115 Ton
- 2 Cakalang, 1233 Ton
- 3 Teri, 1000 Ton
- 4 Tongkol, 1562 Ton
- 5 Dencis, 965 Ton
- 6 dll 889 Ton

Jumlah 6764 Ton

2.2.3. Rumah Sakit

Kabupaten Pidie Jaya, sampai akhir 2010 telah memiliki 1 Rumah Sakit, 10 Puskesmas, 20 Pustu, 82 Polindes, 226 Posyandu, 23 Praktek Dokter, dan 26 toko obat. Total tenaga kesehatan medis, paramedis perawat dan non-perawatan 586 orang.¹⁵

2.2.4. Pendidikan¹⁶

- a. Taman Kanak-Kanak (TK) TA 2010/2011
 -) Jumlah Sekolah : 39 unit (3 Negeri dan 36 Swasta)
 -) Jumlah Kelas : 79 unit (5 Negeri dan 74 Swasta)

¹⁵ Sumber : Hasil Observasi Juni 2012 dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya

¹⁶ Sumber : Hasil Observasi Juni 2012 dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya

-) Jumlah Pelajar: 1.741 orang (128 Negeri dan 1.613 Swasta)
-) Jumlah Guru : 237 orang (69 PNS dan 168 Non-PNS)
- b. Sekolah Dasar (SD) TA 2010/2011
 -) Jumlah Sekolah : 90 unit (89 Negeri dan 1 Swasta)
 -) Jumlah Kelas : 658 unit (588 Negeri dan 7 Swasta)
 -) Jumlah Pelajar : 15.761 orang (15.466 Negeri, 295 Swasta)
 -) Jumlah Guru : 1.873 orang (850 PNS, 1.023 Swasta)
 -) Jumlah Lulusan : 1.983 orang (1.029 Laki-laki, 954 Perempuan)
- c. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) TA 2010/2011
 -) Jumlah Sekolah : 23 unit (21 Negeri, 2 Swasta)
 -) Jumlah Kelas : 199 unit (196 Negeri, 3 Swasta)
 -) Jumlah Pelajar : 4.365 orang (4.291 Negeri, 74 Swasta)
 -) Jumlah Guru : 844 orang (562 Negeri, 279 Swasta)
 -) Jumlah Lulusan : 1.583 orang (794 Laki-laki, 789 Perempuan)
- d. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) TA 2010/2011
 -) Jumlah SMA : 9 unit (8 Negeri, 1 Swasta)
 -) Jumlah Kelas SMA: 119 unit (117 Negeri, 2 Swasta)
 -) Jumlah Pelajar SMA: 4.317 orang (4.277 Negeri, 40 Swasta)
 -) Jumlah Guru SMA: 450 orang (332 PNS, 118 Non-PNS)
 -) Jumlah Lulusan SMA: 1.241 orang (557 Laki-laki, 684 Perempuan)
 -) Jumlah SMK : 3 unit (3 Negeri, 0 Swasta)
-) Jumlah Kelas SMK: 18 unit (18 Negeri, 0 Swasta)
-) Jumlah Pelajar SMK: 289 orang (221 Negeri, 78 Swasta)
-) Jumlah Guru SMK: 98 orang (63 PNS, 35 Non-PNS)
-) Jumlah Lulusan SMK: 10 orang (6 Laki-laki, 4 Perempuan)

2.3. Kondisi Pemerintahan

Jumlah Anggota DPRK Pidie Jaya 2009-2014 sebanyak 25 orang, didominasi Partai Aceh seramai 16 orang, PAN 4 orang, 5 partai lainnya menempatkan masing-masing 1 wakilnya di legislatif Pidie Jaya. Detailnya adalah sebagaimana tabel berikut.¹⁷

Tabel 2

Banyaknya Anggota DPRK Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Kabupaten Pidie Jaya, 2010

Partai Politik	Anggota			Persentase
	L	P	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Partai Aceh (PA)	14	2	16	64
2. Partai Amanat Nasional (PAN)	4	-	4	16
3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	-	1	4
4. Partai Bintang Reformasi	1	-	1	4

¹⁷ Sumber : Hasil Observasi Juni 2012 dan Sekretariat DPRK Pidie Jaya

	(PBR)				
5	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	1	-	1	4
6	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	1	-	1	4
7	Partai Demokrat (PD)	1	-	1	4
Jumlah		23	2	25	100

Jumlah PNS di Kab. Pidie Jaya adalah sebanyak 3.480 orang.¹⁸

Tabel 3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan		Jumlah
(1)		(2)
01	SD/ Sederajat	37
02	SLTP/ Sederajat	36
03	SLTA/ Sederajat	477
04	D1	178
05	D2	401
06	D3	746
07	S1	1543
08	S2	47
09	S3	1
Jumlah Total		3.480

¹⁸ Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pidie Jaya

2.4. Perekonomian dan Ekologi Kabupaten Pidie Jaya

Aktivitas produksi dikelompokkan ke dalam tiga kegiatan yaitu primer, sekunder dan tersier. Kegiatan primer (yang terdiri dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, perkebunan, pertambangan dan penggalian) merupakan kegiatan terbesar yang menyusun PDRB pada kurun waktu 2007 -2010 berkisar antara 60,86 hingga 65,20 persen. Dalam kurun waktu yang sama kontribusi kegiatan sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan, utilitas (listrik dan air bersih) serta konstruksi terhadap total PDRB sekitar 3,97 hingga 4,50 persen.

Sedangkan kontribusi kegiatan tersier yang terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, komunikasi, keuangan, persewaan, jasa perusahaan, dan jasa-jasa mencapai 30,30 hingga 35,17 persen. Hampir setiap tahunnya struktur kegiatan ini tidak berubah dimana kegiatan primer merupakan kegiatan terbesar yang menyusun PDRB Kabupaten Pidie Jaya diikuti oleh kegiatan tersier dan kegiatan sekunder.

Kegiatan primer terutama sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, perkebunan, pertambangan dan penggalian menjadi andalan Pidie Jaya. Untuk wilayah Pesisir mayoritas mata pencaharian adalah nelayan, petani tambak dan melaut.

Berkaitan dengan perekonomian dan lingkungan masyarakat pesisir, masih memerlukan perhatian khusus oleh semua pihak. Padahal Pidie Jaya dan Aceh Timur merupakan tempat benih udang terbaik, untuk kebutuhan Aceh dan Malaysia. Namun potensi ini tidak terberdaya dengan baik. Apalagi tambak banyak yang terbengkalai, saluran tambak belum maksimal, sehingga budidaya udang menurun drastis karena penyakit, masyarakat banyak beralih budidaya Bandeng. Selain itu, Pidie Jaya juga banyak terdapat ikan

kerapu dan kakap laut untuk kebutuhan ekspor, karena masih banyak terumbu karang. Namun disayangkan belum ada pabrik Es yang memadai, ketika musim ikan, banyak ikan mati dan busuk. Selain itu, ada pabrik pengolah biji coklat sampai dapat dikonsumsi langsung, potensi ini juga belum dimaksimalkan.¹⁹ Seperti Gampong Me, Trieng Gadeng, selain ada yang bekerja juga sebagai petani sawah, petani tambak dan pekebun. Baik sebelum dan sesudah tsunami masyarakat di sini adalah nelayan dan petani. Umumnya bekerja sebagai nelayan, sebagian kecil adalah petani/kebun dan tambak. Di kampung ini tidak banyak lahan pertanian yang dapat dijadikan lahan bertani masyarakat dan hanya sebagian kecil yang bekerja sebagai petani.

Penghasilan nelayan tidak menentu, hampir senasib dengan petani, paling besar pernah didapatkan Rp. 400ribu perhari, bahkan pernah tidak dapat apa-apa karena tidak dapat ikan. Sedangkan petani walaupun dapat rezeki ketika masa panen. Kehidupan baik petani atau nelayan hampir sama nasibnya. Terkadang untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami harus hutang di toko dan kios-kios kecil. TPI terdekat dari gampong Meunasah Me adalah di Trieng Gadeng, sehingga TPI tersebut menjadi pilihan bagi nelayan untuk memperdagangkan hasil tangkapannya. Biasanya ikan di di Mns. Me dibeli oleh Muge Eungkot (toke/makelar ikan) karena hanya menggunakan boat (perahu) yang kecil.

Kendala utama bagi nelayan adalah cuaca seperti badai dan gelombang besar,

¹⁹ Hasil FGD dan wawancara dengan Tgk. Thaleb -Panglima Sagoe KPA/PA Trieng Gadeng, Amiruddin KPA/PA dan Muhklis dari KMPA, Taufik Ismail Tokoh Masyarakat, Panglima Laot Tring Gadeng Abu Lhok, Pidie jaya/8 Juni 2012.

sehingga tidak dapat masuk ke laut, selain itu susah sekali mendapat ikan karena daerah ikannya sudah sangat jauh dari pantai dan tidak mungkin berlayar terlalu jauh dengan boat kecil. Sementara, kendala terbesar bagi petani, adalah ketiadaan sarana pengairan. Dan masa bercocok tanam bagi petani padi di sini hanya sekali dalam setahun, selebihnya pada musim kering teman-teman petani beralih menanam tanaman muda seperti cabai, semangka, jagung dan sejenisnya. Masalah ekonomi dan mencari rezeki ke laut itu menurut kesanggupan masing-masing nelayan. Apalagi sejak tsunami sampai sekarang penduduk sudah bercampur dan majemuk.²⁰

Sampai saat ini perekonomian masyarakat di Tring Gadeng terutama Mns. Me sangat *terjepit*. Yang ada sedikit maju adalah penduduknya bertambah karena ada rumah bantuan tsunami yang dibangun di kampung ini.²¹

2.4.1. Ekonomi Mikro Meureudu Pidie Jaya

Perkembangan ekonomi mikro, juga mulai terlihat dengan hadirnya sejenis kue yaitu kue *Ade* adalah sejenis penganan khas Aceh menyerupai Bingkang, dan kue ini sekarang menjadi salah satu cinderamata kuliner terkenal bagi mereka yang berkunjung ke Pidie Jaya. Di Pidie Jaya telah ada pusat jajanan Ade di daerah Meureudu, dengan

²⁰ Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan Alamsyah, Nelayan di Gampong Me, Trieng Gadeng, Pidie Jaya, Khamis 7 Juni 2012, serta sumber data sekunder

²¹ Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan Saraini, Ibu Rumah Tangga, pedagang kios kecil, Gampong Me, Trieng Gadeng, Pidie Jaya, Khamis 7 Juni 2012.

berbagai pilihan merek dagang. Salah satu yang terkenal adalah Ade Kak Nah.

Hj. Hamidah, orang yang pertama sekali mengusahakan perusahaan keluarga *Ade* yang kemudian bernama *Ade Meutia* dimulai tahun 1990, usaha kue khas Aceh *Ade* untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membantu suami, modal pertama hanya 5 buah mangkok (belanga untuk memasak *Ade*). Dengan menjualnya ke rumah-rumah, kios, warung dan sekolah. Kuenya dijual per potong dan ada pula per buah (ukuran satu Loyang / mangkok). Selama 5 tahun Ibu Hj. Hamidah merintis usaha ini dengan sangat sabar, dari hari ke hari pembeli mulai tertarik dengan *Ade* dan peminatnya semakin hari terus bertambah.

Cara membuat Kue *Ade Meutia* ada dua macam jenis *Ade Meutia*, yaitu tepung atau ubi. Bahan-bahan lain untuk membuat *Ade* adalah santan, gula, dan bawang. Ada dua rasa yaitu rasa ubi dan rasa tepung. Kedua rasa tersebut memiliki nilai jual yang sama. Ukuran masing-masing *Ade* tersebut dibedakan menjadi ukuran besar dan kecil. Untuk *ade* yang besar nilai jualnya per buah Rp 25.000,-. Sedangkan untuk ukuran kecil Rp 15.000,-. Sejak usaha *Ade* ini berkembang, penghasilan kotor per bulan yang berhasil didapatkan mencapai 60juta Rupiah sampai 70 juta Rupiah, dengan penghasilan bersih mencapai 12juta Rupiah. Kue *Ade Meutia* sekarang mempekerjakan seramai 20 orang pegawai, rata-rata gaji pekerja sebesar 2juta-2,5juta Rupiah setiap orang per bulannya.

Terkait keterlibatan pemerintah dalam usaha yang digelutinya, tidak dalam bentuk uang tunai / modal, tetapi pemerintah pernah menyelenggarakan beberapa kali seminar dan pelatihan kewira-usahaan terkait produksi *Ade*. Bahkan pernah seminarnya untuk pengusaha *Ade* di seluruh Indonesia. Waktu itu pihak Pemerintah Pusat meminta kami untuk mengubah nama *Ade* menjadi nama Bingkang untuk menyamakan

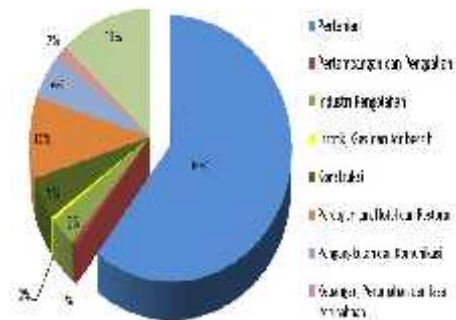
penyebutannya, tetapi mereka tidak mau, khusus dari Aceh nama *Ade* adalah ciri khas kue Bingkang dan saya menolak untuk diubah namanya ke Bingkang. Alhamdulillah selain di Aceh kue ini sudah pernah dikirim sampai ke Jakarta, bahkan pernah dibeli orang Malaysia katanya dibawa pulang ke negerinya".²²

2.4.2. PDRB²³

Kegiatan primer paling utama yang menyokong perekonomian Kabupaten Pidie Jaya adalah sektor pertanian. Pada tahun 2010 sektor ini menyumbang 60,21 persen, diikuti oleh sektor jasa-jasa yang menyumbang 12,75 persen. Sektor pertanian mendapat kontribusi terbesar dari subsektor tanaman bahan makanan yang menyumbang sepertiga dari sektor pertanian, yaitu 26,31 persen. Sedangkan sektor jasa-jasa sebagian besarnya dibentuk oleh subsektor jasa pemerintahan yaitu sebesar 11,91 persen.

Gambar 1

Kontribusi Sektor Ekonomi pada PDRB Pidie Jaya Tahun 2010 (%)



²² Sumber data primer hasil observasi dan wawancara dengan Fadli, Meutia dan Hj. Hamidah, Pengusaha kue *Ade* (Bingkang khas Aceh), Gampong Meunasah Balek, Kecamatan Meureudue, Pidie Jaya, Kamis 7 Juni 2012 serta sumber data sekunder.

²³ Sumber: BPS Pidie Jaya

Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pertumbuhan ekonomi Pidie Jaya mengalami pertumbuhan positif dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Pidie Jaya mengalami kenaikan sebesar 5,38 persen yang merupakan pergerakan PDRB 2009 sebesar 619 milyar ke PDRB 2010 sebesar 652 milyar.

Laju pertumbuhan ekonomi yang besar terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, yaitu sebesar 15,48%, sedangkan laju pertumbuhan paling kecil terjadi pada sektor industri pengolahan, yaitu sebesar 0,62 %. Namun lapangan usaha dengan laju pertumbuhan terbesar maupun terkecil tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laju keseluruhan dari pertumbuhan ekonomi Pidie Jaya karena kontribusi yang diberikan oleh sektor tersebut tidak besar sehingga yang memegang peranan pada pertumbuhan ekonomi Pidie Jaya tetap sektor pertanian sebagai kontributor terbesar pada PDRB Pidie Jaya.

Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi Pidie Jaya 2007-2010 (Persen)

Sektor pertanian terdiri dari subsektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Perubahan kelima subsektor ini sangat mempengaruhi struktur ekonomi Pidie Jaya, dikarenakan kontribusi sektor ini sangat besar. Secara umum kontribusi sektor pertanian pada tahun 2007-2010 berfluktuasi antara 60,21-64,46 persen, dengan kontribusi terbesar berasal dari subsektor tanaman bahan makanan. Pada tahun 2010 ini subsektor tanaman bahan makanan menyumbang 60,21 persen yang diikuti oleh subsektor peternakan dan hasil-hasilnya sebesar 19,29 persen.

Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010
1. Pertanian	1.94	1.64	1.08	2.29
2. Pertambangan dan Penggalian	6.13	6.25	6.60	5.74
3. Industri Pengolahan	1.17	2.43	1.61	0.62
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	87.23	7.53	10.52	14.08
5. Konstruksi	15.18	16.08	14.99	11.94
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	26.56	20.22	17.71	15.48
7. Pengangkutan dan Komunikasi	-0.90	10.29	10.55	8.55
8. Keuangan, Perumahan dan Jasa Perusahaan	5.31	5.20	5.68	5.11
9. Jasa-jasa	5.31	7.91	7.56	7.53
P D R B	5.06	5.26	5.32	5.38

Tabel 5. Peranan Sektor Pertanian Menurut Subsektor Bagi PDRB Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007 – 2010

Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010
Pertanian	64.46	62.76	61.57	60.21
1. Tanaman Bahan Makanan	27.07	26.49	26.29	26.31
2. Tanaman Perkebunan	6.49	6.24	6.10	5.87
3. Peternakan dan Hasil-hasilnya	21.20	20.67	20.28	19.29
4. Kehutanan	0.04	0.04	0.03	0.03
5. Perikanan	9.56	9.42	8.87	8.71
Bukan Sektor Pertanian	35.54	37.24	38.43	39.79
Tanaman Bahan Makanan dan Perkebunan				

Tabel 6. Produksi Padi, Palawija, dan Perkebunan KAB. Pidie Jaya, 2010²⁴

Komoditas		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01	Padi Sawah	12 716,25	12.716,25	87.784	6,32
02	Padi Ladang	319	289	88,7	8,51
03	Kedelai	4.998,88	4.943	8.114,1	1,6
04	Jagung	477	448	681,1	1,5
05	Kacang Tanah	1.160	1.140	2.619,5	2,3
06	Kacang Hija u	400	400	429,2	1,1
07	Ubi Kayu	53,5	49,4	1.307,75	26,5
08	Cabe Merah	99	99	712,8	7,2
09	Bawang Merah	4	4	48	12
10	Tomat	25	25	300	12
11	Cabe	11	11	11	1

	Rawit				
12	Kacang Panjang	36	36	36	1
13	Teron g	9	9	54	6
14	Men timun	10	10	20	2
15	Lang sat	33	21	105	5
16	Duri an	202	161	805	5
17	Man gga	157	84	420	5
18	Pep aya	16	11	55	5
19	Pisa ng	514	257	1.028	4
20	Ram buta n	528	133	645	4,85

Data Peternakan 2010²⁵

- a. Banyaknya Populasi Ternak pada 2010 adalah : 31.025 ekor sapi potong, 2.491 ekor kerbau, 34.993 ekor kambing, 925 ekor domba, 194.151 ekor ayam ras pedaging, 1.090.945 ekor ayam buras, dan 131.738 ekor itik.
- b. Jumlah Pemotongan Ternak Besar dan Kecil yang tercatat di Dalam Rumah Hewan (ekor): 1) sapi potong: 2.179 sapi potong jantan, sapi potong 290 betina; 2) Kerbau: 474 jantan, 79 betina; 3) Kambing: 3.774

²⁴ Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie Jaya

²⁵ Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie Jaya

- jantan, 1.072 betina; 4) Domba: 316 jantan, 64 betina;
- c. Jumlah Pemotongan Unggas yang Tercatat di Dalam Rumah Hewan (ekor): 1) Ayam Buras : 494.976; 2) Ayam Ras Petelur : 157.776; 3) Ayam Ras Pedaging: 255.363; 4) Itik: 73.237.
- d. Jumlah Produksi Daging Ternak Kabupaten Pidie Jaya: 228.217 ekor sapi, 64.287 ekor kerbau, 46.193 ekor kambing, 2.906 ekor domba.
- e. Banyaknya Produksi Telur menurut Jenis Unggas adalah : 597.119 butir telur ayam buras dan 96.009 butir telur itik.

Kondisi Perindustrian

Tabel 7. Keadaan Industri Kecil di Kabupaten Pidie, Tahun 2010²⁶

No	Kategori Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai (dalam ribuan Rupiah)		
				Investasi	Produksi	Biaya
1.	Industri Pangan	2.919	6.027	8.150.280	14.354.353	9.302.589
2.	Industri Sandang	76	251	2.650.397	4.368.814	3.058.167
3.	Industri Kimia	706	1.860	7.406.232	38.816.813	27.666.5

²⁶ Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie

	dan Bah an Ban gun an					36
4.	Indu stri Kera jina n	1.689	4.531	80.030.713	32.796.752	22.138.98
5.	Indu stri Loga m dan Elek tron ika	254	802	4.958.350	8.969.930	6.363.238
Jumlah		5.644	13.471	103.195.972	99.306.662	68.604.28

2. 5. Kendala Alam Dalam Pengembangan Ekonomi-Ekologi

Faktor alam adalah kondisi geografis yang secara inheren dimiliki suatu daerah yang mana apabila terjadi bencana, manusia sebagai penghuninya tidak dapat sepenuhnya mengendalikan. Faktor alam tersebut antara lain wilayah Kabupaten Pidie Jaya seluas 1.162,84 Km² yang terdiri dari luas wilayah darat 952,0 Km² dan Wilayah laut 210,84 Km², dengan koordinat 4,91 - 5,30 Lintang Utara dan 96,02 - 96,36 Bujur Timur.

Permasalahan banjir dan tanah longsor merupakan persoalan alam yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, karena hulu sungai seperti Sungai Krueng Kala yang daerah penyangga berada di luar kewenangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, melainkan

dibawah kewenangan Kabupaten Pidie. Adapun sungai-sungai yang berada diwilayah Kabupaten Pidie Jaya adalah Sungai Krueng Kala di Kecamatan Bandar Baru perbatasan dengan Kabupaten Pidie, Sungai Krueng Cubo berada di Kecamatan Panteraja dan Kecamatan Trienggadeng, Krueng Meureudu yang membelah Kecamatan Meureudu dengan Kecamatan Meurah Dua dan Krueng Jeulangan yang melintasi kecamatan Bandar Dua dan Jangka Buya. Sungai-sungai tersebut sangat rawan terjadinya banjir karena perilaku masyarakat masih membuang sampah dan limbah rumah tangga ke sungai dan banyaknya pohon penyangga sungai yang telah mati akibat penebangan dan tidak optimalnya fungsi irigasi yang ada serta eksploitasi sumberdaya sungai berupa Bahan Galian C (pasir dan batu).

Secara topografi Kabupaten Pidie Jaya berada pada ketinggian 0,80 m s/d 125,0 m di atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan lahan antara 0 sampai 40%, dimana untuk kota kota kecamatan seperti Panteraja, Treinggadeng, dan Meureudu berada dipesisir pantai laut Malaka. Secara keseluruhan Kabupaten Pidie Jaya rawan terhadap banjir dan erosi. Kecamatan Ulee Glee yang merupakan wilayah yang berada ditempat yang lebih tinggi dari daerah lainnya dan wilayah selatan dari kecamatan Bandar Baru, Panteraja, Trienggadeng dan Merah Dua dari Kabupaten Pidie Jaya juga merupakan kawasan hutan yang selama ini terjadi penebangan hutan yang tidak terkendalinya dan kurang berhasilnya reboisasi kawasan hutan berpotensi untuk terjadinya erosi. Dari klasifikasi lereng, Kabupaten Pidie Jaya merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki daerah kelas lereng lebih besar dari 40 % dan daerah pesisir pantai yang memiliki klasifikasi lereng 0 - 3 %. Bila dilihat dari jenis tanah kabupaten Pidie Jaya, jenis tanah podzolit merah kuning merupakan jenis terluas dengan beberapa jenis tanah lainnya. Keadaan

tanah efektif di Kabupaten Pidie Jaya mencapai 94,78 % untuk kedalaman lebih dari 90 cm, sedangkan sisanya 5,22 % tersebar ke dalaman lainnya.

Penggunaan lahan di Kabupaten Pidie Jaya terbagi atas beberapa bagian/fungsi yaitu daerah daratan yang berfungsi sebagai daerah permukiman dan lahan perkebunan serta pertanian, dan daerah rawa/tambak yang terdapat di sepanjang pantai. Paska tsunami terjadi pergeseran fungsi lahan yang sebelumnya berorientasi ke pantai, sekarang ini mengarah menjauhi pantai, hal ini terjadi akibat kerusakan di kawasan pesisir pantai dan terjadinya penurunan permukaan daratan.

SIMPULAN

Pemerintahan mukim dan gampong sebagai struktur pemerintah terbawah dan kultural di Pidie Jaya masih dapat diandalkan sebagai representasi publik. Untuk program yang berhubungan dengan penggarapan wilayah, maka penting untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan geuchik dan imum mukim, bukan hanya dengan bupati dan dinas terkait. Di sini aparat agampong akan bisa menjadi mediator dengan kekuatan lokal di Pidie Jaya, yaitu KPA/PA.

Hukum laut atau *reusam laot* di Pidie Jaya tidak begitu berperan sebagai media resolusi konflik di Pidie Jaya. Maka penting untuk melakukan pendampingan dan pelatihan termasuk merevitalisasi peran panglima laot dan hukum adat laut. Peran pang laot bukan hanya mengatur regulasi kelautan bagi para nelayan, tapi juga sebagai media sosialisasi dan resolusi konflik sosial.

Struktur sosial masyarakat Pidie Jaya yang lebih kohesif dan tidak konfrontatif sangat potensial untuk melakukan kerja sama, terutama program-program yang berhubungan dengan *community development*. Masyarakat Pidie Jaya cukup bisa diandalkan untuk menjadi fasilitator bagi dirinya sendiri. Peran

lembaga pembantu cukup sebagai supervisor. Meskipun demikian, program itu harus dapat dilihat sebagai media untuk meningkatkan energi sosial masyarakat sendiri dan bukan program bagi-bagi uang yang membuat masyarakat menjadi adiktif dan tergantung.

Potensi konflik di Pidie Jaya kemungkinan akan terjadi di tahun 2013, ketika akan dilaksanakan Pilkada bupati. Maka penting untuk ikut serta mencerdaskan pilihan politik masyarakat dan mendukung pilkada damai melalui pelatihan pemilih (*voter education dan civic education*), sehingga masyarakat yang terdidik akan menjauhi dirinya dari perilaku politik destruktif. Perlu juga mendidik para jurnalis untuk ikut mengembangkan jurnalisisme damai (*peace journalism*), melalui diskusi dan pelatihan. Posisi bupati Pidie Jaya yang cukup *legitimated* di mata para aparaturnya pemerintahan dan masyarakat adalah modal tersendiri untuk melakukan kerjasama. Menginisiasi program dengan mengedepankan peran bupati adalah jalan singkat untuk mencapai kesuksesan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rasyid, Harun. 1989. *Teknik Sampling*. Bahan Penataran Peningkatan Kemampuan Meneliti Staf Pengajar/Peneliti/Perencana/Penyuluh. Bandung: LPPM-IKOPIN.
- [Alfian. \(editor\). 1977. *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh. Hasil-hasil Penelitian dengan Metode "Grounded Research"*. Jakarta. Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.](#)
- [Badaruddin. 2001. *Kelembagaan Sosial-Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan: Studi Di Dusun Nelayan Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara*. Laporan Penelitian Dosen Muda. Dikti.](#)
- [Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif. Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penggunaan Model Aplikatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.](#)
- Ginting, Bengkel. 1996. *Respon Rumah Tangga Nelayan Terhadap Program Pembangunan Bidang ekonomi dan Kesra: Studi Kemiskinan di Dusun Nelayan Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara*. Tesis S-2. IPB. Bogor.
- Hadmoko., Danang Sri, 2010., *Peranan peta Risiko Bencana Tanah longsor dalam pengurangan risiko bencana*.
- Ibrahimy, el. 1982. *Tgk. M. Daud Beureueh. Perannya dalam Pergolakan Aceh*. Jakarta. Gunung Agung.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metode Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Melalatoa, Junus. 1997. *Sistem Budaya Indonesia*. Jakarta. Pamor.
- Melalatoa, Junus. Dkk. 2005. *Aceh Kembali Kemasa Depan*. Jakarta. IKJ Press.
- Moleong, J. Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosda Mubyarto; Loekman Soetrisno dan M. Dove. 1984. *Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi*

Antropologi di Dua Desa Pantai.
Rajawali. Jakarta.

Mulyana, Deddy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

[Nikujuluw, Viktor P.H. 2001. *Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu*, PSKPL IPB, Bogor](#)

Usman. A. Rani. 2003. *Sejarah Peradapan Aceh. Suatu Analisa Interaksionalis, Integrasi dan Konflik*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

Zulkifli. 1989. *Pemborong dan Nelayan: Pola Hubungan Patron-Klien pada Masyarakat Nelayan (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan bagan deli Kecamatan Medan Belawan Kodya Medan)*. Tesis S-2. UGM. Yogyakarta.

Sumber Bacaan Lainnya:

Aceh and Nias Two Years After The tsunami.
2006 Progress Report. BRR and Partners.
Desember 2006

Aceh at the Crossroads. Imam Budidarmawan
Prasodjo. Paper presented at the

Aceh Poverty Assessment 2008. *Aceh Tsunami after construction On Poverty In Aceh.*